



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN SEBATIK TENGAH**



**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
KECAMATAN SEBATIK TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dijelaskan bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini, semoga menjadi arah dan pedoman bagi aparatur Kecamatan Sebatik Tengah didalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat mewujudkan Visi Kecamatan dan Visi Kabupaten Nunukan.

 CAMAT,

ARIS NUR, SSTP

NIP. 19830515 200112 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	4
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	6
A. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN AKHIR BULAN MARET TAHUN 2025	6
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN.....	7
C. IDENFIKASI RISIKO.....	10
D. ANALISI RISIKO.....	16
E. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN.....	18
F. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN.....	18
BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN.....	26
A. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	26
BAB. IV PENUTUP.....	28
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dipimpin oleh Camat yang dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan tugas atributif berupa tugas umum pemerintahan. Selain itu, Camat dalam menjalankan fungsinya, juga melakukan tugas delegatif berupa pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Mengingat semakin kompleks tugas camat khususnya Kecamatan Sebatik Tengah, maka dibuat suatu pola perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dijabarkan pada Rencana Kerja (Renja). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja SKPD (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Salah satu dasar dari proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Sebatik Tengah yang penjabarannya dituangkan dalam Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2016. Lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dikemukakan bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2025, antara lain :

- 1) Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
- 8) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033;
- 22) Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
- 24) Peraturan Bupati Nunukan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- 25) Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat di Kabupaten Nunukan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2025 adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun oleh semua lapisan masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2025 adalah agar tercipta sinergitas, sinkronisasi, dan terintegrasinya pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Nunukan dengan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Sebatik

Tengah, serta sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

D. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat tentang Evaluasi Renja samapai akhir bulan maret tahun 2025.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Perubahan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMAPAI AKHIR BULAN MARET TAHUN 2025

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Bulan Maret Tahun 2025

Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Akhir Bulan Maret Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025 yang terealisasi dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 terbagi atas 6 program dan dijabarkan dengan 26 kegiatan, meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa..

1. Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 10) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 11) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 12) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 13) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3) Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan
- 4) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 1) Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- 4) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
- 5) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebatik Tengah sampai akhir bulan maret 2025, dapat dilihat pada tabel 2.1. *(Terlampir)*

B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah

Penyelenggaraan MR dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2024, rencana tindak pengendalian yang disusun Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan Kecamatan Sebatik Tengah yaitu Meningkatkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Tingkat Kecamatan.

Berdasarkan hasil analisis dapat disampaikan Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Indikator Program pada Renstra Kecamatan Sebatik Tengah sebagai berikut:

Mapping MR berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan, dan Indikator Kegiatan Kecamatan Sebatik Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan berkualitas	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima yang kepada Masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan (IKM)	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase penyelenggaran tugas pemerintah dan pelayanan publik kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien 2. persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang proporsional	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3. Koordinasi Pelaksaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4. Koordinasi Pelaksaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

C. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan dengan cara mengkaji dan mendata kemungkinan- kemungkinan atau kejadian-kejadian yang berpotensi menghambat atau menggagalkan pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil diskusi (FGD) dan *brainstorming* Identifikasi Risiko Strategis (Program) dan Identifikasi Risiko Operasional OPD (Kegiatan) Kecamatan Sebatik Tengah, maka dapat disampaikan hasil identifikasi risiko yang ada pada Kecamatan Sebatik Tengah, yaitu:

1. Hasil Identifikasi Risiko Strategis Kecamatan Sebatik Tengah Kab. Nunukan :

Identifikasi Risiko Strategis Kecamatan Sebatik Tengah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumb er		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan berkualitas	IKM								
1	Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima yang kepada Masyarakat	IKM								
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	Tidak optimalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK	RSO.24.7.36.01	Camat	Jaringan Internet yang tidak memadai Alat perekaman sering rusak Tidak adanya SDM terlatih	Internal	UC	Terhambatnya pelayanan Tidak tercapainya target	1. Masyarakat 2. Kecamatan
			Dokumen kurang lengkap	RSO.24.7.36.02	Camat	Tidak Mengetahui persyaratan	Internal	C	Tidak dapat diproses	1.Masyarakat 2.Pemdes 3. Kecamatan

1.2 .	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparatur desa dan BPD) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan)	RSO.24. 7.36.03	Camat	1. Kualitas SDM Desa belum memadai 2. Regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang koplek (berasaldari 3 kementerian yang berbeda) dan sering berubah-ubah 3. Kuantitas SDM kecamatan tidak memadai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (terdapat 4 desa)	Interna l	C/U C	1. Mekanisme perencanaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan terutama dalam hal waktu dan penetapan program dan kegiatan tepat sasaran 2. Pembangunan dan pemberdayaan desa terhambat dan kurang maksimal	1. Masyarakat 2. Pemdes 3. Kecamatan
----------	--	---	---	--------------------	-------	---	--------------	----------	--	--

Dari tabel di atas diketahui bahwa ada 2 (Dua) program yang mendukung pencapaian tujuan PD yaitu **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** dan **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, dengan risiko yang diidentifikasi, yaitu Tidak optimalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK dan Dokumen kurang lengkap serta Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparatur desa dan BPD) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan) .

2. Hasil Identifikasi risiko operasional Kecamatan Sebatik Tengah Kab. Nunukan

Hasil identifikasi risiko operasional Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2024 seperti pada table berikut:

Hasil Identifikasi Risiko Operasional Kecamatan Sebatik Tengah 2025

No	Kegiatan	IndikatorKeluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan	Tidak optimalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK	ROO.24.7.3 6.01	Camat dan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	1.Jaringan Internet yang tidak memadai 2. Alat perakaman sering rusak 3. Tidak adanya SDM terlatih	Internal dan eksternal	UC	1. Terhambatnyap elayanan 2. Tidak tercapainya target	1. Masyarakat 2. Kecamatan
			Pelaksanaan	Kelengkapan dokumen kurang lengkap	ROO.24.7.3 6.02	Camat dan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kelengkapan berkas/persyaratan	eksternal	C	Tidak terlayaniadminis trasi	1. Kecamatan 2. Pemerintah Desa 3. Masyarakat
2	PelaksanaanUr usanPemerinta han yang terkaitdenganK ewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan	Tidak lengkapnya data pada laporan	ROO.24.7.3 6.03	Camat dan Kasi Sosek dan Kesra	1. Data terdapat di instansiterkait 2. Anggaran tidak memadai	Internal dan eksternal	UC	Laporan Kurang maksimal	1. Kecamatan 2. Pemerintah Desa 3. Masyarakat

3	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan	Peran OPD teknis dalam pembangunan kawasan perdesaan di wilayah perbatasan masih sangat kurang	ROO.24.7.3 6.04	Camat dan Kasi PMD	1. Kewenangan kecamatan terbatas sehingga program dan kegiatan hanya terbatas pada koordinasi dan konsultasi internal (ke OPD teknis dan/atau pemerintah desa) 2. Pelimpahan kewenangan kepada Camat tidak disertai dengan pelimpahan anggaran, dokumen dan personil yang memadai	Internal dan eksternal	UC	1. Pembangunan di wilayah perbatasan tidak terlaksana sesuai dengan penentuan prioritas (pengembangan kakao dan hasil perkebunan lainnya)	1. Kecamatan 2. Pemerintah Desa 3. Masyarakat
4	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Pelaksanaan	Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparaturdesa dan BPD) dalam penyelengaraa nadministrasi pemerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan)	ROO.24.7.3 6.05	Camat dan Kasi PMD	1. Kualitas SDM Desa belum memadai 2. Regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang kompleks (berasaldari 3 kementerian yang berbeda) dan sering berubah-ubah 3. Kuantitas SDM kecamatan tidak memadai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (terdapat 4 desa)	Internal dan eksternal	UC	1. Mekanisme perencanaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan terutama dalam hal waktu dan penetapan program dan kegiatan tepat sasaran 2. Pembangunan dan pemberdayaand esa terhambat dan kurang maksimal	1. Kecamatan 2. Pemerintah Desa 3. Masyarakat

Dari table di atas diketahui bahwa ada 4 (empat) kegiatan yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian tujuan PD, yaitu:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
4. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Dari kegiatan tersebut, setelah diidentifikasi maka ditemukan 4 (empat) risiko, yaitu:

1. Tidak optimalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK serta Kelengkapan dokumen kurang lengkap
2. Tidak lengkapnya data pada laporan
3. Peran OPD teknis dalam pembangunan kawasan perdesaan di wilayah perbatasan masih sangat kurang
4. Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparatur desa dan BPD) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan)

C. Analisis Risiko

Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Setelah risiko teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko. Hasil identifikasi risiko tersebut dilakukan dengan memberikan skor kepada masing masing risiko penyebab dan dampak dari masing masing risiko. Masing masing nilai diberi skor dan dirata-ratakan skor tersebut. Hasil analisis risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Skala risikoKecamatan Sebatik Tengah dari hasil Analisis resiko seperti pada table berikut:

N o.	“Risiko” yang Teridentifikasi			Kode Risiko	Analisis Risiko		
					Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b			c	d	e	f=dxe
A.	Risiko Strategis Kecamatan Sebatik Tengah						
	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
		a.	Tidak optimalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK	ROO.24.7 .36.01	3	3	9
		b.	Kelengkapan dokumen kurang lengkap	ROO.24.7 .36.02	4	2	8
	2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
		-	Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparaturdesa dan BPD) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan)	ROO.24.7 .36.03	3	3	9
B.	Risiko Operasional Dinas/Badan/Kantor						
	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		-	Tidak optimalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK	ROO.24.7 .36.01	3	2	6
		-	Kelengkapan dokumen kurang lengkap	ROO.24.7 .36.02	4	1	4
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		-	Tidak lengkapnya data pada laporan	ROO.24.7 .36.04	3	2	6

	3	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					
			Peran OPD teknis dalam pembangunan kawasan perdesaan di wilayah perbatasan masih sangat kurang	ROO.24.7 .36.05	2	3	6
	4	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					
			Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparatur desa dan BPD) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan)		4	1	4

Selanjutnya berdasarkan skor tersebut dibuat matrikan alisis resiko untuk melihat risiko mana yang akan menjadi prioritas yang akan dikendalikan. Risiko prioritas yang harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik berada pada angka > 6, yaitu :

1. Tidak optimalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK
2. Kelengkapan dokumen kurang lengkap
3. Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparaturdesa dan BPD) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan)

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Penanganan Risiko dilakukan dengan langkah-langkah pengendalian yang disusun secara sistematis dengan tujuan menurunkan tingkat kemungkinan dan dampak. Hal ini dilaksanakan melalui pembangunan lingkungan pengendalian sebagai upaya pengendalian awal yang diharapkan mampu menurunkan tingkat kemungkinan dan dampak risiko sehingga meminimalkan perlunya tindakan pengendalian lanjutan.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Pengendalian yang masih dibutuhkan seperti pada table berikut:

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	RisikoPrioritas	Kode Risiko	UraianPengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	RencanaTindakPengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	RisikoStrategis						
1	Tidak optimalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK	ROO.24.7.36.01	Koordinasi dengan Disdukcapil		1. Perbaikan Secara Berkala pada alat perakaman 2. Peningkatan Kapasitas SDM Kecamatan baik dari kualitas dan kuantitas	Camat Kasi PM aparator SIAK	1 tahun
2	Kelengkapan dokumen kurang lengkap	ROO.24.7.36.02	Menginformasikan pada masyarakat untuk melengkapi berkas		1. Surat Edaran 2. Melakukansosialisasi	Camat Kasi PM	1 tahun
3	Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparatur desa dan BPD) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan)	ROO.24.7.36.03	1. Melaksanakan pembinaan Administrasi Desa bagi aparatur desa 2. Melaksanakan monitoring dan pengawasan administrasi keuangan dan pembangunan desa		1. Melakukan penekanan terhadap peran kades dan BPD dalam manajemen organisasi yang baik melalui pembinaan langsung dan tidak langsung 2. Peningkatan Kapasitas SDM kecamatan baik dari kualitas maupun kuantitas	Camat Kasi PMD	1 tahun
II	Risiko Operasional Dinas/Badan/Kantor						
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
	Tidak optimalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK	ROO.24.7.36.04	Koordinasi dengan Disdukcapil		1. Perbaikan Secara Berkala pada alat perakaman 2. Peningkatan Kapasitas SDM Kecamatan baik dari kualitas dan kuantitas	Camat Kasi PM	1 tahun

	Kelengkapan dokumen kurang lengkap	ROO.24.7.36.05	Menginformasikan pada masyarakat untuk melengkapi berkas		1. Surat Edaran 2. Melakukan sosialisasi	Camat Kasi PM	1 tahun
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
	Tidak lengkapnya data pada laporan	ROO.24.7.36.06	Koordinasi dengan Instansi terkait		Memaksimalkan data yang tersedia	Camat Kasi Sosek	1 tahun
3	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						
	Peran OPD teknis dalam pembangunan kawasan perdesaan di wilayah perbatasan masih sangat kurang	ROO.24.7.36.07	Koordinasi dengan Instansi terkait		Melakukan pendekatan dengan instansi dan pemangku kebijakan	Camat Kasi PMD	1 tahun
4	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
	Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa (aparatur desa dan BPD) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (Administrasi Umum dan Keuangan)	ROO.24.7.36.08	1. Melaksanakan pembinaan Administrasi Desa bagi aparatur desa 2. Melaksanakan monitoring dan pengawasan administrasi keuangan dan pembangunan desa		1. Melakukan penekanan terhadap peran kades dan BPD dalam manajemen organisasi yang baik melalui pembinaan langsung dan tidak langsung 2. Peningkatan Kapasitas SDM kecamatan baik dari kualitas maupun kuantitas	Camat Kasi PMD	1 tahun

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN

A. Program Dan Kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa..

2. Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 10) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 11) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 12) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 13) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

- 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 3) Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan
 - 4) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
- 1) Fasilitas Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
- 1) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 3) Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - 4) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
 - 5) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Rumusan Rencana Program Dan Pendanaan Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Sebatik Tengah seperti pada Tabel 4.1(terlampir).

BAB V

P E N U T U P

Rencana kerja SKPD (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang diaplikasikan melalui berbagai program dan kegiatan. Pada prinsipnya program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan upaya Kecamatan Sebatik Tengah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Nunukan.

Salah satu dasar dari proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Sebatik Tengah yang penjabarannya dituangkan dalam Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

Disamping itu, dokumen perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan harapan agar dapat mengakomodir segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Sebatik Tengah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Sebatik Tengah ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Nunukan secara keseluruhan.

Akhir kata, semoga rencana kerja (Renja) Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2025 dapat diwujudkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Amin....

Sebatik Tengah, 22 Juli 2025
CAMAT,

ARIS NUR, SSTP
NIP. 19830515 200112 1 005

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebatik Tengah

[illegible]

5		7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Rp 13,340,000.00	2 Laporan	Rp 13,000,000.00	1 Laporan	Rp 6,690,000.00	0 Laporan	Rp 0	-	-	-	-	-	-	-	0 Laporan	Rp 0	0.00 %	0.00 %	2 Laporan	Rp 13,000,000.00	200.0 0 %	97.45 %	KEC. SEBATIK TENGAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			200.0 0	97.45		
Predikat kinerja															SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR			SR	SR			UNK	ST		
		7	01	04			PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																										
		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																										
6		7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Rp 79,880,640.00	2 Laporan	Rp 72,812,750.00	1 Laporan	Rp 13,498,680.00	0 Laporan	Rp 0	-	-	-	-	-	-	-	0 Laporan	Rp 0	0.00 %	0.00 %	2 Laporan	Rp 72,812,750.00	200.0 0 %	91.15 %	KEC. SEBATIK TENGAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			200.0 0	91.15		
Predikat kinerja															SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR			SR	SR			UNK	ST		
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																										
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																										
7		7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	Rp 37,362,860.00	100 Orang	Rp 22,314,000.00	50 Orang	Rp 109,166,480.00	0 Orang	Rp 0	-	-	-	-	-	-	-	0 Orang	Rp 0	0.00 %	0.00 %	100 Orang	Rp 22,314,000.00	200.0 0 %	59.72 %	KEC. SEBATIK TENGAH	
8		7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Rp 53,193,160.00	2 Dokumen	Rp 26,345,000.00	1 Dokumen	Rp 19,449,160.00	0 Dokumen	Rp 0	-	-	-	-	-	-	-	0 Dokumen	Rp 0	0.00 %	0.00 %	2 Dokumen	Rp 26,345,000.00	200.0 0 %	49.53 %	KEC. SEBATIK TENGAH	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			200.0 0	54.62		
Predikat kinerja															SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR			SR	SR			UNK	R		
		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																										
		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																										
9		7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 Dokumen	Rp 6,642,800.00	1 Dokumen	Rp 5,440,000.00	1 Dokumen	Rp 6,642,800.00	0 Dokumen	Rp 0	-	-	-	-	-	-	-	0 Dokumen	Rp 0	0.00 %	0.00 %	1 Dokumen	Rp 5,440,000.00	0.00 %	81.89 %	KEC. SEBATIK TENGAH	
10		7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	Rp 26,439,320.00	2 Dokumen	Rp 12,871,500.00	1 Dokumen	Rp 19,839,320.00	0 Dokumen	Rp 0	-	-	-	-	-	-	-	0 Dokumen	Rp 0	0.00 %	0.00 %	2 Dokumen	Rp 12,871,500.00	200.0 0 %	48.68 %	KEC. SEBATIK TENGAH	
11		7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga kemasyarakatan	1 Dokumen	Rp 12,705,980.00	2 Dokumen	Rp 13,100,000.00	1 Dokumen	Rp 6,249,860.00	0 Dokumen	Rp 0	-	-	-	-	-	-	-	0 Dokumen	Rp 0	0.00 %	0.00 %	2 Dokumen	Rp 13,100,000.00	200.0 0 %	103.1 0 %	KEC. SEBATIK TENGAH	

		7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0 Laporan	Rp 20,026,120.00	0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	20,026,120.00	0 Laporan	Rp 0	-	-	-	-	-	-	0 Laporan	Rp 0	0.00 %	0.00 %	0 Laporan	Rp 0	0.00 %	0.00 %	KEC. SEBATIK TENGAH		
13		7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Rp 11,656,060.00	2 Laporan	Rp 11,330,000.00	1 Laporan	5,886,060.00	0 Laporan	Rp 0	-	-	-	-	-	-	0 Laporan	Rp 0	0.00 %	0.00 %	2 Laporan	Rp 11,330,000.00	200.0 0 %	97.20 %	KEC. SEBATIK TENGAH		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			120.0 0	66.18	
Predikat kinerja																SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR			SR	SR			UNK	S		
		X					NON URUSAN																										
		X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																										
		X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																										
		X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																										
14		X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 17,250,000.00	2 Dokumen	Rp 12,160,000.00	1 Dokumen	8,640,000.00	0 Dokumen	Rp 0	-	-	-	-	-	-	0 Dokumen	Rp 0	0.00 %	0.00 %	2 Dokumen	Rp 12,160,000.00	200.0 0 %	70.49 %	KEC. SEBATIK TENGAH		
15		X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 53,751,440.00	2 Laporan	Rp 10,974,000.00	1 Laporan	32,631,440.00	0 Laporan	Rp 0	-	-	-	-	-	-	0 Laporan	Rp 0	0.00 %	0.00 %	2 Laporan	Rp 10,974,000.00	200.0 0 %	20.42 %	KEC. SEBATIK TENGAH		
		X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																										
16		X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	Rp 2,981,873,462.00	34 Orang/bulan	Rp 4,155,658,703.00	12 Orang/bulan	1,952,281,256.00	3 Orang/bulan	Rp 389,598,361.00	-	-	-	-	-	-	3 Orang/bulan	Rp 389,598,361.00	25.00 %	19.96 %	3 Orang/bulan	Rp 4,545,257,064.00	30.00 %	152.4 3 %	KEC. SEBATIK TENGAH		
		X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																										
17		X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 208,145,810.00	3 Paket	Rp 161,534,060.00	1 Paket	178,328,000.00	0 Paket	Rp 0	-	-	-	-	-	-	0 Paket	Rp 0	0.00 %	0.00 %	3 Paket	Rp 161,534,060.00	300.0 0 %	77.61 %	KEC. SEBATIK TENGAH		
18		X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 107,193,360.00	9 Paket	Rp 123,925,510.00	3 Paket	53,144,720.00	1 Paket	Rp 5,314,000.00	-	-	-	-	-	-	1 Paket	Rp 5,314,000.00	33.33 %	10.00 %	10 Paket	Rp 129,239,510.00	333.3 3 %	120.5 7 %	KEC. SEBATIK TENGAH		
19		X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 13,387,440.00	4 Paket	Rp 13,479,396.00	2 Paket	6,693,720.00	0 Paket	Rp 0	-	-	-	-	-	-	0 Paket	Rp 0	0.00 %	0.00 %	4 Paket	Rp 13,479,396.00	200.0 0 %	100.6 9 %	KEC. SEBATIK TENGAH		
20		X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp 7,391,890.00	3 Laporan	Rp 11,146,454.00	1 Laporan	4,276,140.00	0 Laporan	Rp 0	-	-	-	-	-	-	0 Laporan	Rp 0	0.00 %	0.00 %	3 Laporan	Rp 11,146,454.00	300.0 0 %	150.7 9 %	KEC. SEBATIK TENGAH		
21		X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123 Laporan	Rp 211,930,800.00	136 Laporan	Rp 247,847,919.00	70 Laporan	139,540,000.00	20 Laporan	Rp 13,948,000.00	-	-	-	-	-	-	20 Laporan	Rp 13,948,000.00	28.57 %	10.00 %	156 Laporan	Rp 261,795,919.00	126.8 3 %	123.5 3 %	KEC. SEBATIK TENGAH		
		X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
22		X	XX	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp 51,300,000.00	2 Unit	Rp 51,837,000.00	1 Unit	155,000,000.00	0 Unit	Rp 0	-	-	-	-	-	-	0 Unit	Rp 0	0.00 %	0.00 %	2 Unit	Rp 51,837,000.00	0.00 %	101.0 5 %	KEC. SEBATIK TENGAH		
23		X	XX	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp 49,000,000.00	1 Unit	Rp 32,678,400.00	4 Unit	244,000,000.00	0 Unit	Rp 0	-	-	-	-	-	-	0 Unit	Rp 0	0.00 %	0.00 %	1 Unit	Rp 32,678,400.00	0.00 %	66.69 %	KEC. SEBATIK TENGAH		

[illegible]

PENYESUAIAN KINERJA URUSAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Nama OPD : Kecamatan Sebatik Tengah

Bidang Urusan :

[illegible]

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025 SAMPAI DENGAN AKHIR TRIWULAN I

Nama OPD : Kecamatan Sebatik Tengah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renstra OPD Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)		Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renja PD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Akhir Triwulan I Tahun 2025		Persentase Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Akhir Triwulan I Tahun 2025		Catatan Penting
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(10)= 8/6 *100	(11)= 9/7*100	12
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah			100	2,791,949,741	20.69	694,305,421	20.69	24.87	
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas yang disusun			1	30,550,960	-	-	-	-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat yang disusun Daerah			1	4,320,000	-	-	-	-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1	26,230,960	-	-	-	-	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan			12	1,734,443,793	3	589,598,361	25.00	33.99	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12	1,734,443,793	3	589,598,361	25.00	33.99	
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum			1	232,556,520	-	19,262,060	-	8.28	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	131,228,000	-	-	-	-	

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			3	34,807,700	1	5,314,060	33.33	15.27	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			2	3,971,220	-	-	-	-	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1	2,855,600	-	-	-	-	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			70	59,694,000	12	13,948,000	17.14	23.37	
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan Barang			100	399,000,000	-	-	-	-	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	155,000,000	-	-	-	-	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	244,000,000	-	-	-	-	
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Penyediaan Jasa			1	333,949,248	-	82,520,000	-	24.71	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2	37,020,000	1	4,920,000	50.00	13.29	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	2,750,000	-	-	-	-	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2	294,179,248	1	77,600,000	50.00	26.38	
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD			1	61,449,220	-	2,925,000	-	4.76	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			5	61,449,220	1	2,925,000	20.00	4.76	
UNSUR KEWILAYAHAN											
20											
KECAMATAN SEBATIK TENGAH											
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien			100	50,023,320	32	22,185,325	32.01	44.35	

a.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1	31,610,010	1	22,185,325	100.00	70.18	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1	31,610,010	1	22,185,325	100.00	70.18	
b.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan yang dilimpahkan			1	6,590,000	-	-	-	-	
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1	6,590,000	-	-	-	-	
c.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan			1	11,823,310	-	-	-	-	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			1	4,240,390	-	-	-	-	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan			1	7,582,920	-	-	-	-	
C.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat			100	3,340,000	-	-	-	-	
a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang diberdayakan			4	3,340,000	-	-	-	-	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1	3,340,000	-	-	-	-	
D.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan			100	6,961,090	-	-	-	-	
a.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan			1	6,961,090	-	-	-	-	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1	6,961,090	-	-	-	-	
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100	105,704,620	-	-	-	-	
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan fasilitas keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			1	105,704,620	-	-	-	-	

1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			50	94,867,640	-	-	-	-	
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1	10,836,980	-	-	-	-	
F.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional			100	28,989,840	-	-	-	-	
a.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi			1	28,989,840	-	-	-	-	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1	5,336,000	-	-	-	-	
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			1	8,957,860	-	-	-	-	
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			1	5,309,860	-	-	-	-	
4	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			1	5,561,060	-	-	-	-	
5	Koordinasi Pelaksaaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			1	3,825,060	-	-	-	-	
	Jumlah				100	2,791,949,741	21	716,490,746	20.69	25.66	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Nama OPD : Kecamatan Sebatik Tengah

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA 2025			PAGU (Rp) TAHUN 2025			KETERANGAN
					Renja	DPA	Perubahan Renja	Renja	DPA	Perubahan Renja	
	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum		sesudah	sebelum		sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	84,88	84,88	84,88	3,186,775,164	3,186,775,164	2,793,949,761	
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas yang disusun	1	1	1	41,271,440	41,271,440	32,550,980	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat yang disusun Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat yang disusun Daerah	1	1	1	8,640,000	8,640,000	4,320,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	32,631,440	32,631,440	28,230,980	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	1	1	1	1,952,281,256	1,952,281,256	1,734,443,793	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	10	10	1,952,281,256	1,952,281,256	1,734,443,793	
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum				381,982,580	381,982,580	232,556,520	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	178,328,000	178,328,000	131,228,000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	3	3	53,144,720	53,144,720	34,807,700	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	2	2	6,693,720	6,693,720	3,971,220	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	1	4,276,140	4,276,140	2,855,600	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	70	70	139,540,000	139,540,000	59,694,000	

d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan Barang	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan Barang				399,000,000	399,000,000	399,000,000	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	155,000,000	155,000,000	155,000,000	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	244,000,000	244,000,000	244,000,000	
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Penyediaan Jasa	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Penyediaan Jasa				335,199,248	335,199,248	333,949,248	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	2	37,020,000	37,020,000	37,020,000	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	4,000,000	4,000,000	2,750,000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	2	2	294,179,248	294,179,248	294,179,248	
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD				77,040,640	77,040,640	61,449,220	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	5	5	77,040,640	77,040,640	61,449,220	
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN SEBATIK TENGAH											
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien				69,300,040	69,300,040	50,023,320	
a.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				33,240,010	33,240,010	31,610,010	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	1	33,240,010	33,240,010	31,610,010	

b.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan yang dilimpahkan	Jumlah urusan yang dilimpahkan				12,810,000	12,810,000	6,590,000	
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	1	12,810,000	12,810,000	6,590,000	
c.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	Jumlah urusan yang dilimpahkan	1	1	1	23,250,030	23,250,030	11,823,310	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	1	1	8,207,590	8,207,590	4,240,390	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	0	0	0	15,042,440	15,042,440	7,582,920	
C.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	100	100	100	6,690,000	6,690,000	3,340,000	
a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang diberdayakan	Jumlah Desa yang diberdayakan				6,690,000	6,690,000	3,340,000	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	1	6,690,000	6,690,000	3,340,000	
D.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100	100	100	13,498,680	13,498,680	6,981,000	
a.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	1	1	1	13,498,680	13,498,680	6,981,000	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	1	13,498,680	13,498,680	6,981,000	
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	128,615,640	128,615,640	105,724,620	
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan fasilitas keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Kegiatan fasilitas keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	1	1	1	128,615,640	128,615,640	105,724,620	

1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebansaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebansaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50	50	50	109,166,480	109,166,480	94,887,640	
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	1	19,449,160	19,449,160	10,836,980	
F.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	100	100	100	58,637,560	58,637,560	31,060,980	
a.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	1	1	1	58,637,560	58,637,560	31,060,980	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	1	1	6,642,800	6,642,800	5,336,000	
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	1	1	19,832,720	19,832,720	8,967,960	
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1	1	1	6,249,860	6,249,860	5,309,880	
4	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	1	1	20,026,120	20,026,120	5,561,080	
5	Koordinasi Pelaksaaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksaaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	1	1	5,886,060	5,886,060	5,886,060	